

**STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
DENGAN HUKUM KEWARISAN ADAT
KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

RIZQI LAILAH

NIM. 10500107064

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2011

HALAMAN PERSEMBAHAN

Catatan kecil untuk awal dari sebuah perubahan

“hanya ada satu sisi yang wajib kamu ubah dalam kehidupan ini, dan itu adalah belajar dari kesalahan dan kekeliruan dari dirimu sendiri kemudian memperbaikinya, itulah awal untuk mengubah sisi lain dari dunia ini”

(RIZQI LAILAH)

Buat Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Mallappiang Pabeta, St. Hartati

Terima kasih atas setiap kasih sayang yang kalian berikan dan semua pengorbanan dalam mengasuh, mendidik, membimbing, dan selalu mencukupi setiap kebutuhaku selama ini.

Saudara-saudaraku, Raden Intan Kasuma, Ridha L. Ghani,

Rahma Alam Nur Hudayah, Nur Azis Gea, Adias Warman, Muhammad Idhul

Terima kasih atas bantuan, dukungan dan motifasi yang memberiku semangat yang selalu kalian hadiahkan untukku,

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 Desember 2011

Penulis,

RIZQI LAILAH
NIM: 10500107064

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto** penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna meskipun telah berusaha secara maksimal, dengan keterbatasan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan, waktu dan literatur yang ada, penulis berusaha menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan tekad yang besar serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berharga dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Hamsir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, atas bimbingan arahan dan kesabarannya dalam mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.
2. Ibu St. Nurjannah, SH.MH., selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Dr. Abdillahi Mustari, S.Ag, M. Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;

3. Seluruh Dosen beserta Pegawai Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar yang telah memberikan ilmunya dan membantu Penulis selama menjalani perkuliahan;
4. Sahabat-sahabatku, Muhammad Ibrahim Ibnu Yunus, Nur Ismi, Hasnifa, Risna, Riski Indrawati, Wahyuni, Irmawati, Yusuf, Fatma dan saudara yang selama ini memberikan support dalam rangka penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh teman-temanku Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Mengingat bahwa sifat ilmu pengetahuan adalah dinamis dan akan terus mengalami perkembangan, sementara skripsi ini tidak dapat dikatakan sempurna maka Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Sebelumnya Penulis memohon maaf bilamana terdapat kekurangan dan kesalahan lain yang tidak berkenan di hati.

Akhirnya, lebih dari segala kemuliaan, penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi Tuhan yang senantiasa membimbing jalan hidup ini untuk meraih segala kebaikan dan kepadanya penulis sandarkan segala pengharapan. Semoga dapat bermanfaat baik terhadap pribadi penulis terlebih kepada khalayak banyak dan menjadi suatu amalan jariyah yang tak ternilai harganya.

Makassar, 7 Desember 2011

Penulis,

Rizqi Lailah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Hipotesis	4
D. Definisi Operasional dan Batasan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Garis Besar Isi Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ADAT	10
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	10
2. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	14
B. PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ADAT	16
1. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam	16
2. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat	18
C. CARA MEMPEROLEH HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	30
1. Cara Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Islam	30
2. Cara Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Adat	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mengenal Wilayah Kabupaten Jeneponto.....	46
B. Sistem Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto	47
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Kecamatan..... Bontoramaba Kabupaten Jeneponto	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : **Rizqi Lailah**

Nim : 10500107064

Judul : **Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto**

Judul skripsi ini adalah **Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto**. Tujuan dari penelitian ini mencoba mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan sistem kewarisan adat pada masyarakat Jeneponto, bagaimana praktek pelaksanaan warisan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, serta bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem kewarisan itu terhadap permasalahan kewarisan di Kabupaten Jeneponto.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem kewarisan yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat adat Jeneponto adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-laki. Ia berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Ada beberapa alasan mengapa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar. *Pertama*, anak tertua bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. *Kedua*, anak tertua bertanggung jawab atas kedua orang tuanya sampai mereka meninggal nantiya. Meskipun menganut sistem mayorat laki-laki, dalam masyarakat Jeneponto tetap mendahulukan kepada siapa pewaris ingin memberikan hartanya dan berapa banyak jumlahnya. Pembagian biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang dihadiri pewaris dan ahli waris. Sistem dan Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Jeneponto tidak sesuai dengan *farâ'id*. Namun sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.

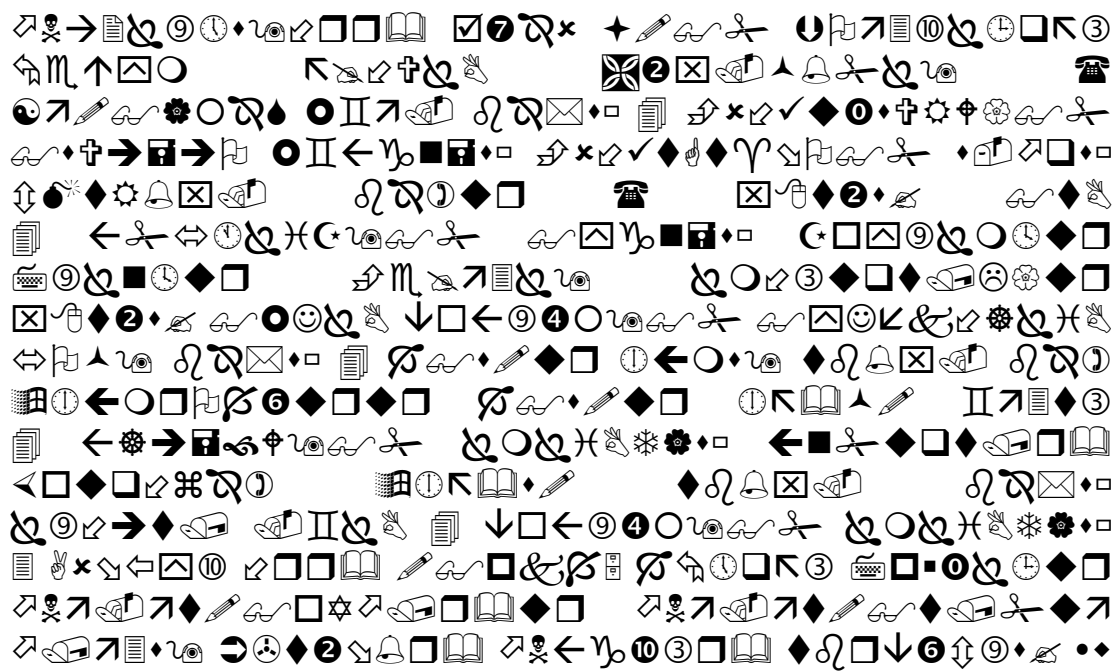
Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya.¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang bagaimana gambaran pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum adat di kabupaten Jeneponto. Dalam penjelasan tersebut di atas kita sudah dapat melihat perbedaan antara sistem pewarisan yang diberlakukan di kabupaten Jeneponto dengan Hukum

¹Riana Kesuma Ayu, "Sistem Hukum Waris Adat" Blog Riana Kesuma Ayu. <http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat> - 36k. (21 Mei 2011).

Dalam proses pembagian harta warisan menurut adat kewarisan di kabupaten Jeneponto, pembagian warisan dapat dilakukan meski pun si pewaris masih hidup. Dan yang juga dalam pembagian warisan tidak di tentukan bagian tetap untuk si pewaris. Bagian yang diperoleh ahli waris tergantung pada kebutuhannya.

Berdasarkan ketentuan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketentuan yang berlaku dalam hukum kewarisan adat yang berlaku sangat berbeda dengan ketentuan kewarisan yang diatur dalam ajaran Islam, salah satu contohnya adalah, dalam hukum kewarisan adat tidak ditentukan bagian mutlak bagi para ahli waris, sedangkan dalam Al-Qur'an telah di tuliskan dalam Surat An-Nisa ayat 11:





Terjemahnya:

Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsipnya asas hukum waris adat yang berlaku tentunya memiliki asas-asas yang sangat penting, karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum barat dan hukum Islam, namun tujuan dari diberlakukannya hukum waris adat ini untuk kemaslahatan juga.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Teremahannya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), 79.

Dalam setiap penelitian ada hal-hal yang membuat seorang peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, begitu pun dengan penulis, yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kewarisan menurut hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto dalam perbandingannya dalam sistem kewarisan yang berlaku di dalam hukum Islam. Dalam hal ini, yang membuat penulis memilih penelitian mengenai sistem kawarisan adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto karena penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam sistem kewarisan adat di kabupaten Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang mengambang atau terjadi kesimpangsiuran dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dirumuskan ke dalam beberapa sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana system hukum waris adat yang berlaku di kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana system hukum waris adat yang berlaku di kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hukum waris adat yang diberlakukan di kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto?

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui hasil penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penarapan pembagian waris secara adat di Kabupaten Jeneponto dalam pembagiannya tergantung pada keinginan pemilik harta warisan, dengan kata lain tidak ada pembagian harta secara mutlak melainkan sesuai keinginan pemilik harta warisan.
2. Banyak perbedaan antara sistem pembagian kewarisan secara adat di Kabupaten Jeneponto dengan sistem kewarisan islam, jika dalam Islam permasalahan warisan muncul saat si pewaris telah meninggal dunia sedangkan dalam sistem kewarisan adat kabupaten Jeneponto, harta waris justru dibagikan ketika si pewaris masih hidup.
3. Dalam pembagian harta warisan yang diberlakukan oleh masyarakat Jeneponto sering terjadi tidak diskriminasi yang penyebabnya antara lain, karena pemberlakuan hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto tidak berlaku asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sehingga sering terjadi ada ahli waris yang merasa didiskriminasi sehingga akhirnya muncul perselisihan yang mengakibatkan pertikaian yang bahkan mengakibatkan para ahli waris saling membunuh hanya karena masalah pembagian harta warisan tersebut.

D. Defenisi Operasional dan Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengetahui dan memahami judul penelitian ini, maka dikedepankan beberapa pengertian judul, yaitu:

Pelaksanaan mengandung arti proses atau cara untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini mengenai proses pelaksanaan kewarisan yang berlaku di kabupaten Jeneponto.

Kewarisan proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya.³

Hukum Adat terdiri dari dua suku kata yaitu “hukum” dan “adat” Telah kita ketahui bersama bahwa “hukum” adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁴ Sedangkan “Adat” mengandung arti aturan (perbuatan dsb) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang merupakan seperangkat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga dianggap sebagai sebuah bentuk hukum yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana keinginan masyarakat.⁵

Hukum adat juga dapat di artikan sebagai hukum yang tidak tertulis atau berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Perbandingan artinya membandingkan dua hal yang berbeda untuk mengetahui persamaan atau selisihnya.⁶ dalam hal ini yang di maksud oleh penulis adalah penulis bertujuan melakukan penelitian untuk mencari perbedaan dan

³ Riana Kesuma Ayu SH. MH., “SISTEM HUKUM WARIS ADAT,”. *Blog Riana Kesuma Ayu*. <http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat> - 36k -. (21 Mei 2011).

⁴ Jur. Andi Hamzah, *terminology Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 119.

⁵ Artikata.com. *dictionary*, <http://www.artikata.com/arti-3117766-adat.html> (22 Juni 2011).

⁶ *ibid.*

persamaan antara sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan adat yang di anut oleh masyarakat kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi yng akan dijadikan tempat penelitian penulis.

Dengan demikian berdasarkan definisi operasional dan batasan masalah di atas penulis dengan yakin mengatakan bahwa judul yang diangkat oleh penulis belum pernah ada sebelumnya, begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai judul yang diangkat oleh penulis tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap aktivitas manusia selalu disertai dengan harapan sebagai landasan untuk melangkah lebih jauh, harapan ini terkadang dimanifestasikan ke depan untuk suatu tujuan. Tujuan penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan penelitian ini, sasaran utamanya adalah:

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, adapun tujuan penulis melakukan penelitian antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum tentang pelaksanaan kewarisan menurut hukum adat Jeneponto.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kewarisan menurut hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto, apakah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Islam atau justru sebaliknya sangat bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana pengaplikasian hukum Islam yang berlaku di kabupaten Jeneponto sehingga sebagian besar masyarakatnya justru menganut sistem kewarisan secara adat bukan mengikuti anjuran yang telah ditetapkan dalam ajaran islam dalam pembagian warisan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Yaitu, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya dan juga dapat dimanfaatkan pada penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini setidaknya mampu memberikan informasi kepada pembaca bahwa di zaman modern seperti saat ini masih ada masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan secara adat, sedangkan kewarisan itu sendiri telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadits yang telah tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau pun hukum positif atau yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Garis Besar Isi Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang konprehensif dalam penyusunan, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka mengenai Penerapan Hukum Adat secara umum dan dan sistem kewarisan menurut hukum islam.

Bab III mengemukakan tentang Metodologi Penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan jenis dan sumber data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi data hasil penelitian tentang penerapan hukum adat di kabupaten Jeneponto. Analisis penulis mengenai kekurangan dan kelebihan hukum kewarisan adat kabupaten Jeneponto.

Bab V Penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan, saran-saran dan di lengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

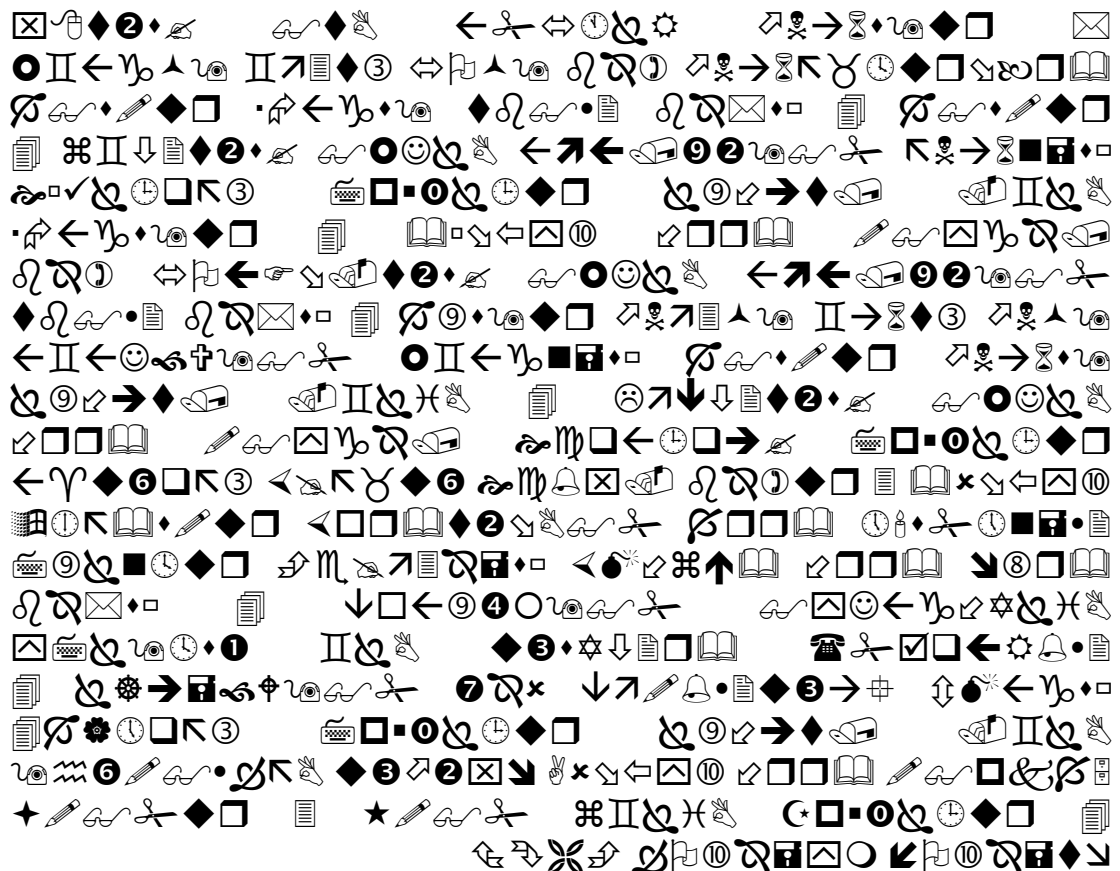
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Hewarisan Islam dan Adat

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Dalam Komplasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Jika dihubungkan dengan ayat mawaris dalam Al-Qur'an (An-Nisa'/4:12) :



Terjemahnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹

Kandungan ayat di atas bahwa hukum waris memiliki arti:”hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan,”²

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu : - يرث - yang berarti pindahnya harta dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan konkret maupun abstrak.³ Bisa juga

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang; CV. Asy-Syifa 1998), h 63.

² Definisi hukum kewarisan yang demikian terutama diilhami oleh isi kandungan Q.S. An-Nisa(4):12.

³ A Assad Yunus. *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Al-Qushwa), h.1.

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian hukum kewarisan, ada beberapa pengertian yang diberikan fuqaha, antara lain :

الفقه المتعلق

Terjemahnya:

“Fiqh yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.”⁶

Menurut Asy-Syarbini Fikih Mawaris ialah fikih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta warisan dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Terjemahnya:

“Ilmu untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta waris dan yang tidak berhak mendapatkannya dan bagian-bagian masing-masing ahli waris serta tata cara pembagiannya.”⁷

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum tentang pemindahan hak

⁵ M. Sakban, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2004), h. 33.

⁶ M. Asyarbani Al-Khatib, *Maknul Mukhtaj* (Kairo: Mstafa Al-Babi Al-Halab, 1958), h. 111:3.

⁷ Hasbi As-Sidiq, *Fiqh Mawaris hukum Waris Dalam Syariah Islam* (Jakarta: Bulan Buntang, 1979), h. 18.

pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan ketentuan syari'at.

2. Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai hukum adat waris, maka sebaiknya kita mengenal dahulu apa pengertian dari hukum adat waris atau hukum adat kewarisan, jika kita bicara mengenai kewarisan sudah barang tentu kata kuncinya disini adalah ada orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, ada harta warisan / harta peninggalan, dan ada ahli waris atau waris.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris / waris baik berupa harta budel/ harta pusaka baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat/ *testamen* maupun secara lisan. Harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang atau yang bagi dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris / waris baik yang dituangkan melalui surat wasiat/testamen yang memuat pernyataan-pernyataan dari pewaris tentang bagaimana cara meneruskan, pengurus, mengolah, harta peninggalan/harta warisan sehingga tetap terjaga dan tidak jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan/harta warisan dapat diteruskan kepada waris dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.⁸

Berbeda dengan sistem pewarisan yang lain, hukum waris adat yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang menjadi dasar hukum pembagian waris adat.

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu: “memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari satu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.”⁹

⁸ Riana Kesuma Ayu SH. MH., “SISTEM HUKUM WARIS ADAT,” *Blog Riana Kesuma Ayu*. <http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat-36k-similar-pages>. (21 Mei 2011)

⁹ *Ibid.*

B. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Adat

1. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam

Dalam kewarisan, antara hukum adat dengan hukum Islam, terdapat beberapa persamaan misalnya dalam bentuk subjek, objek dan unsur-unsur kewarisan. Dalam Islam yang merupakan subjek kewarisan adalah pewaris dan ahli waris, objek kewarisan adalah harta waris dan Islam pula mengenal pewaris, ahli waris dan harta waris sebagai unsur-unsur kewarisan.

Rukun-rukun kewarisan ada tiga yaitu:¹⁰

- 1) *Muwarrits* (orang yang memberi warisan), yakni mayat dimana orang lain berhak mewarisi dari padanya apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- 2) *Wârits* (penerima warisan), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti : kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- 3) *Maurûts* (benda yang diwariskan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya. *Maurûts* ini juga disebut *irtsun*, *turâtsun* dan *murâtsun* yang kesemuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan mayat ahli waris.

Namun, dasar hukum pengaturan kewarisan Islam, mempunyai tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, serta ijtihad para ulama yang mengatur mengenai hukum waris.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, h. 38.

a. Al-Qur'an

Dalam sistem hukum Islam, hukum kewarisan menempati posisi strategis. Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an. Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan tentang masalah kewarisan adalah an-Nisa (4) : 7, 8, 11, 12, 13, dan 176 serta surat al-Ahzab (33) : 6.

b. Hadis

Meskipun al-Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (al-Qur'an), dalam arti Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (*qaûl*), perbuatan (*fi'il*), maupun dengan cara lain (*suqut taqrîr*).

c. Ijtihad

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sharih. Misal, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian.

¹¹ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jogjakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 43.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.¹²

2. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Adat

Pengaturan hukum kewarisan adat pada dasarnya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan dianggap sebagai sebuah bentuk hukum dimana bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi dan harus dipatuhi oleh masyarakat adat.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternernd*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip *unilateral* berganda (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materiel maupun immateriel).

Hukum adat waris pula mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan.

¹² *Ibid.*, h. 36.

- b. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
- c. Sistem kewarisan mayorat:
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya, pada masyarakat di Tanah Semendo.¹³

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan
- b. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,2007), h. 260.

garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dinagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris.
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris.
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris, dan keturunannya.
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.
- e. Dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

- a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Demikian pula harus diperhatikan kedudukan pewaris, misalnya sebagai bujangan, janda, duda dan seterusnya.

Menelaah gambaran umum yang telah dipaparkan di atas, maka dalam hukum waris adat ini, yang menjadi pokok pembahasan adalah.

Pertama, mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang merupakan ahli waris. Membicarakan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris, pada

dasarnya membahas mengenai subyek hukum waris. Dengan demikian, ruang lingkup pertama adalah mengenai subyek hukum waris.

Kedua, akan ditelaah saat, kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara pengalihan itu dilakukan antara generasi. Juga akan ditinjau mengenai bagaimana bagian serta pembagian harta warisan itu dilakukan. Mengenai masalah di atas, berarti pada dasarnya membicarakan peristiwa hukum warisan. Termasuk dalam peristiwa hukum waris adalah hak-hak dan kewajiban yang muncul dari peristiwa itu.

Ketiga, adalah menelaah mengenai apa sajakah yang menjadi harta warisan itu dan apakah semua harta itu dapat diwariskan kepada ahli waris. Mempersoalkan hal-hal ini berarti membahas materi dari obyek hukum waris.¹⁴

a. Subyek Hukum Waris Adat

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum di Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.

¹⁴*Ibid.*, h. 261-262.

Kelihatannya bahwa dalam masyarakat ada yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal, ahli warisnya adalah anak laki-laki saja. Di Batak yang merupakan ahli waris itu hanyalah anak laki-laki saja, demikian juga di Bali. Tetapi di Bali selain anak laki-laki (kandung), juga tergolong sebagai ahli waris adalah anak laki-laki angkat. Namun, pada masyarakat di Sumatra Selatan golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan.

Berlainan dengan masyarakat *patrilineal*, pada masyarakat dengan sistem bilateral yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Di Jawa, misalnya, semua anak, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama (*gelijk gerechtigd*) itu mengandung hak untuk diperlakukan sama (*geligik gerechtigd*) oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperasikan harta benda keluarga. Anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dapat pula ditemui pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan bilateral lainnya, misalnya di Kalimantan yaitu pada suku Dayak dan di Sulawesi yaitu pada masyarakat Tanah Toraja.

Walaupun masyarakat Sawu itu menganut sistem bilateral dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan ahli waris, akan tetapi mereka (masyarakat Sawu) sedikit mempunyai hukum waris yang spesifik. Anak laki-laki hanyalah merupakan ahli waris dari harta peninggalan bapaknya (orang tua laki-laki) dan anak perempuan hanyalah merupakan ahli waris dari harta peninggalan ibunya (orang tua perempuan).

Menyimpang dari banyak masyarakat di Indonesia adalah masyarakat Tasifeto di Kabupaten Belu Timur (Nusa Tenggara Timur). Pada masyarakat ini yang

merupakan ahli waris utama adalah keponakan tertua yaitu anak saudara kandung ayahnya. Anak-anaknya sendiri tidak memperoleh warisan, jadi bukan ahli waris.

Pada beberapa masyarakat tertentu, misalnya di Tanah Semendo, dan di kalangan suku-suku Dayak Sandak dan Dayak Tayan di Kalimantan Tengah, yang merupakan ahli waris adalah anak perempuan yang tertua, dan bila tidak ada anak perempuan, digantikan oleh anak laki-laki termuda.

Dalam susunan sanak-saudaranya yang bersegi satu, terdapat dua halangan terhadap mewarisnya anak-anak dari (kedua) orang tuanya. Anak tidak mewarisi dari salah seorang dari orang tuanya, oleh karena orang tuanya itu tetap tergolong dalam lingkungan kerabatnya sendiri, misalnya di Minangkabau, di mana anak-anak termasuk dalam clan ibunya, sehingga hak waris anaknya menurut hakim waris (tanpa ada surat wasiat), atas harta peninggalan bapaknya (orang tua laki-laki) adalah tidak mungkin sama sekali. Dengan demikian, menurut hukum adat di Minangkabau anak-anak tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya secara utuh, akan tetapi hanya mewarisi dari ibunya. Tetapi, selain dari anak kandung, maka family atau kerabat juga sebagai ahli waris. Pada masyarakat ini (Minangkabau) harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Dengan demikian apabila seorang istri itu meninggal dunia dan misalnya ia mempunyai sebidang tanah sawah, maka sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya, harta pusaka ini dinamakan harta generasi pertama, atau juga di sebut harta sako, juga sering disebut dengan harta pusaka rendah. Apabila yang meninggal dunia itu adalah seorang suami, maka harta itu tidak

menjadi harta pusaka keluarga dari anak-anak kandungnya, akan tetapi merupakan harta pusaka dari keluarga si suami itu sendiri, yaitu saudara-saudara kandungnya.

Disamping harta pusaka rendah, dikenal pula harta pusaka tinggi, yaitu harta pusaka yang telah turun temurun dari beberapa generasi.¹⁵

b. Objek Hukum Waris Adat

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga itu. Di muka telah dinyatakan bahwa harta keluarga itu dapat berupa:

- a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga,
- b. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan.
- d. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.

Pada masyarakat di NTT, harta yang dapat diwariskan adalah:

- a. Harta milik sendiri dari ayah yang berupa pusaka,
- b. Harta milik ibu, berupa:
 - 1) Milik sendiri
 - 2) Milik bawaan
- c. Harta milik usaha bersama.

Sedangkan pada masyarakat Bali, berdasarkan hasil diskusi kedudukan wanita dalam hukum waris menurut hukum adat Bali, maka harta warisan terdiri dari:

¹⁵ *Ibid.*, h.263-267.

a) *Harta pusaka yang terdiri dari:*

- 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis-religius, contohnya adalah tempat ibadah, alat pemujaan, keris yang bertuah, dan lain-lain.
- 2) Harta pusaka yang dapat dibagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis-religius, misalnya sawah, ladang dan lain-lain

b) *Harta bawaan yaitu harta yang dibawa baik oleh mempelai wanita maupun pria kedalam perkawinan misalnya.*

c) *Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.*

d) *Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya: mempergunakan kuburan dan melakukan upacara pitra yadnya.*

Pada masyarakat yang menganut sistem kawarisan individual, maka para ahli waris hanya akan memperoleh harta kewarisan yang merupakan sisa dari harta peninggalan yang telah dikurangi dengan harta yang dibayarkan untuk pelunasan hutang. Harta waris inilah yang dibagi-bagikan.¹⁶

c. *Unsur Pewarisan Adat*

Untuk mengetahui bagian objek waris adat, maka penting untuk diketahui unsur-unsur apa sajakah yang dilingkupinya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari pewaris, ahli waris dan harta waris.

¹⁶*Ibid.*, h.278-279.

a. Pewaris

Yaitu orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diwariskan. Lazimnya adalah orang tua.

b. Ahli Waris

Terdapat golongan ahli waris yang diprioritaskan yaitu:

1) Anak kandung.

Dalam hukum adat, anak kandung yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain anak kandung, ahli waris yang diprioritaskan adalah janda atau duda. Jika anak kandung, janda atau duda tidak ada, maka warisan akan jatuh pada golongan di atasnya, yaitu orang tua si pewaris.

2) Orang tua si pewaris

Jika orang tua si pewaris tidak ada, termasuk tidak ada janda/duda, maka harta warisan akan jatuh pada golongan yang dibawahnya, yaitu saudara dari pewaris.

3) Saudara dari pewaris yang disebut juga warisan menyamping.

Selain ketiga golongan yang diprioritaskan tersebut, beberapa golongan ahli waris lain ditentukan berdasarkan status anak. Dari status anak dapat diketahui apakah anak tersebut berhak (dapat) mewarisi atau pun tidak.

a. Anak angkat

1) Merupakan anak yang diangkat. Bisa jadi anak angkat tersebut merupakan anak yang diangkat. Bisa jadi anak angkat tersebut masih memiliki

hubungan darah dengan orang tua angkatnya atau pun tidak ada golongan darah sama sekali.

- 2) Anak angkat berhak menerima warisan bersama dengan anak kandung. Namun bagiannya tidak sama persis dengan anak kandung.

b. Anak tiri.

- 1) Merupakan anak yang dibawa suami atau istri dari perkawinan terdahulu terhadap ayah atau ibu yang bukan ayah atau ibu biologisnya.
- 2) Anak tiri berhak menerima warisan tetapi terbatas pada bagian harta warisan ayah atau ibu kandungnya saja.

c. Anak luar kawin

Merupakan anak yang dilahirkan bukan dari hasil perkawinan yang sah. Anak luar kawin hanya berhak atas warisan yang berasal dari ibunya, karena ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.¹⁷

d. *Hak dan Kewajiban Ahli Waris*

Di dalam bagian titik tolak dan ruang lingkup telah dinyatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan materi dan peristiwa hukum. Hal ini adalah tepat, oleh karena peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak (maupun kewajiban) atau menghapuskan hak (maupun kewajiban).

¹⁷ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2009), h. 7-8.

Oleh karena dengan meninggalnya sipewaris dan meninggalkan harta warisan, maka perlu di tinjau mengenai hak dan kewajiban dari ahli waris sehubungan dengan harta warisan yang diterima itu

Pada beberapa masyarakat yang menganut prinsip garis garis keturunan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat, khususnya pada masyarakat lampung. Ahli waris itu mempunyai hak untuk menikmati harta warisan, teruta untuk kelangsungan hidup keluarganya dan barkuasa untuk mengusahakan sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi bersama keluarga dan untuk adik-adiknya.

Pada masyarakat Minangkabau, dengan mengingat bahwa sistem pewarisannya adalah kolektif, maka harta warisan itu merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Barang-barang yang demikian itu hanya dapat dipakai saja oleh segenap keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Jadi, para anggota keluarga hanya mempunyai hak pakai saja. Demikian juga halnya dengan masyarakat hitu di Ambon.

Pada masyarakat-masyarakat lainnya, pewarisan merupakan suatu cara untuk memperoleh hak milik. Jadi, dengan di baginya warisan itu, maka para ahli waris itu memperoleh hak milik atas benda atau barang tersebut.

Apabila tentang masyarakat lampung telah diuraikan mengenai hak yang diperoleh ahli waris, maka perlu dikemukakan tentang kewajiban dari ahli waris itu. Kewajiban utama dari ahli waris adalah menjaga dan memelihara keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan untuk memelihara kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan adik-adiknya dalam berbagai bidang kehidupan.

Di daerah-daerah Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di Bali, para ahli waris mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut. Demikian juga kewajiban untuk menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkannya adalah demikian penting, sehingga seorang ahli waris dengan tidak setahu waris ahli waris lainnya boleh menjual sebagian harta peninggalan untuk membiayai penguburan dimaksud.

Selain dari kewajiban di atas, terdapat kewajiban lain yaitu menyelenggarakan upacara atau keselamatan (sedekahan) dalam memperingati hari meninggalnya pewaris. Malahan dalam masyarakat Indonesia terdapat tradisi untuk mengadakan keselamatan (sedekah) ang dimulai dari tiga hari setelah wafatnya, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, setahun, dan seribu hari. Bahkan untuk masyarakat Jawa tengah dan Jawa timur, terdapat kewajiban untuk memperingati meninggalnya seseorang itu, setahun, dua tahun dan seribu hari setelah meninggalnya seseorang. Pada masyarakat Lampung, terdapat suatu kecenderungan untuk memperingati hari meninggalnya seseorang pada setiap tahun, sehingga ada upacara bahwa masyarakat Lampung tidak memperingati ulang tahun dari mereka yang hidup akan tetapi memperingati ulang tahun dari hari meninggalnya seseorang. Pada umumnya biaya-biaya untuk keselamatan di atas, ditanggung oleh ahli waris.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, h. 275-277.

C. Cara memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

1. Cara Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Islam

a. Syarat-syarat Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Islam

1) Meninggalnya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh hartanya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali setelah ia meninggal.

2) Masih hidupnya para ahli waris

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

3) Diketahuinya posisi ahli waris

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum kewarisan perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan

bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dijelaskan apakah ia saudara kandung, seayah atau seibu. Mereka masing-masing hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *zhawî al-furûdh*, ada yang *'ashabah*, ada yang terhalang tidak mendapatkan warisan (*mahjûb*).¹⁹

b. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak mewarisi adalah:

- 1) Kekerabatan sesungguhnya, yakni hubungan nasab. Yaitu ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, para paman dan lain-lain. Ringkasnya adalah : orang tua, anak dan orang-orang yang bernasab dengan mereka. Q.S. Al-Anfal/8: 75.

وأولو الأرحام بعضهم أولى بـ

Terjemahnya:

“Orang-orang bertalian darah, setengahnya lebih dekat daripada yang lain dalam kitab Allah.”²⁰

- 2) Pernikahan, yaitu akad nikah yang syah yang terjadi di antara suami isteri, sekalipun sesudah pernikahan belum terjadi persetubuhan atau berduaan di tempat sunyi (*khalwat*). Mengenai nikah fasid atau nikah batal, tidak bisa menyebabkan hak waris. Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4: 12.

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع

مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين

¹⁹ *Ibid.*, h. 38-39

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998), h. 149.

Terjemahnya:

“Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika tidak beranak; tapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya.”²¹

- 3) Perbudakan, yaitu hubungan bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan hartanya, sabda Rasul :

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hak wala’ itu bagi orang yang memerdekakan.”²²

- 4) Tujuan Islam (*Jihâtul al-Islâm*), yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya ditaruh di Baitul Mal untuk kepentingan orang Islam. Menurut fuqaha Hanafiah, Hanabilah, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Mesir bahwa kas perbendaharaan negara mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan bukan mempusakai, tetapi dengan anggapan bahwa ia adalah lembaga untuk menyalurkan kemaslahatan umat Islam. Sementara menurut fuqaha Syafi’iyah, Baitul Mal mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan mempusakai melalui usubah atau atas nama Islam. Alasannya sabda Rasul SAW :

وارث من لا وارث له اعقل له وارثه

²¹ *Ibid.*, h. 62.

²² Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-asy’as, *Kitab Al faraid, Bab Fi Al-Jaddati, No. 1458* (Beirut: Dar. Al-Fikr, 1993), h. 111:7.

Terjemahnya:

“Saya adalah ahli waris dari orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya dapat membayar dendanya dan mewarisinya.”²³

c. Penghalang Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Yang menjadi penghalang dalam kewarisan ada tiga, yaitu, perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.²⁴

1) Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi hak milik tuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran surat An-Nahal 16: 75, yang menafikan kecakapan budak untuk bertindak dalam segala bidang yaitu :



Terjemahnya:

“Allah mengadakan suatu contoh, seorang hamba sahaya yang dimiliki orang, tiada berkuasa atas suatu apapun...”²⁵

2) Pembunuhan

²³ Dani Hidayat, *Ringkasan Syarah Arbain An-Nawawi, Bab Faraid Nomor 3036* <http://hadithalislam.com/bayan/tree.asp?lang=ind>. (Akses tanggal 2 November 2011).

²⁴ Drs. A. Asaad Yunus. *op. cit.*, h. 30.

²⁵ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 220.

Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang dibunuh meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh.

Sabda Rasulullah Saw :

القاتل لا يرث

Terjemahnya:

“Pembunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuh”.²⁶

3) Berlainan agama

Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan *muwarris*/ berbeda agama. Sabda Rasul :

لا يرث المسلم الكافر ولا

Terjemahnya:

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak pula mewarisi seorang muslim.”²⁷

Dalam urusan dunia dan akherat hubungan antara dua kerabat yang tidak seagama hanya sebatas dalam hal-hal berbuat baik saja dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut soal agama. Hak kewarisan merupakan soal agama karena ketentuan pelaksanaannya atas kehendak Allah SWT.

²⁶ Dani hidayat, *Bulughul Maram versi 2.0.2008*, <http://hadithalislam.com/bayan/tree.asp?lang=ind>. (Akses tanggal 2 November 2011).

²⁷ Dani Hidayat, *Kitab Faraid Sahih Muslim Nonor 3027*, <http://hadithalislam.com/bayan/tree.asp?lang=ind>. (Akses tanggal 2 November 2011).

Dalam pembagian harta warisan kadang-kadang tidak semua ahli waris yang ada menerima harta warisan atau terhijab. Menurut istilah fara'id, hijab ialah halangan kepada bagian ahli waris untuk mendapatkan warisan atau bagian karena terdinding oleh ahli waris lain. Hijab dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. *Hijâb Nuqshân*, yaitu, berkurangnya hak/terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima warisannya yang banyak, berpindah pada bagiannya yang sedikit, karena adanya ahli waris lain yang tertentu. Misal suami kalau tidak ada anak mendapat $\frac{1}{2}$ tetapi bila ada anak mendapat $\frac{1}{4}$, karena adanya anak pewaris.
- b. *Hijâb Hirmân*, yaitu, hilangnya hak atau terhalangnya seseorang ahli waris untuk memperoleh seluruh bagiannya karena adanya ahli waris yang lebih dekat dari pada dirinya.²⁸ Hijab hirman dibagi menjadi dua yaitu :
 - 1) *Hijâb hirmân bi al-washfi*, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris karena adanya suatu sebab seperti karena membunuh, perbedaan agama dan lain-lain.
 - 2) *Hijâb hirmân bi as-syakhshi*, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian karena adanya ahli waris yang lain. Umpamanya cucu atau saudara si mati tidak dapat menerima warisan kalau si mati mempunyai anak.

²⁸ Drs. A. Asaad Yunus. *op. cit.*, h.41.

Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dinamakan *furudul muqaddarah*, yaitu : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur'an disebut '*ashabah*', maksudnya adalah para ahli waris yang menerima sisa bagian setelah orang-orang yang mempunyai bagian (*zhawî al-furûd*) telah mengambil bagiannya.

'*Ashabah* dibagi menjadi tiga macam

1. *Ashabah bi an-Nafsih* artinya 'asabah itu bukan karena disebabkan adanya ahli waris lain, tetapi lain memang asalnya sudah menjadi ahli waris '*ashabah*.
2. '*Ashabah bi al-gaîr*, yaitu ahli waris '*ashabah* yang '*ashabah*nya itu karena tertarik oleh ahli waris 'asabah yang lain. Misal '*ashabah* nya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan. Mereka menjadi '*ashabah* karena tertarik oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan saudara laki-laki yang pada mulanya mereka termasuk ahli waris *zhawî al-furûd*.
3. '*Ashabah ma'al gaîr*, yaitu '*ashabah* yang '*ashabah*nya itu karena bersama-sama dengan ahli waris *zhawî al-furûd* yang lain, misalnya saudara perempuan dapat menjadi '*ashabah* karena bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.

2. Cara Memperoleh Harta Warisan Menurut Hukum Adat

a. Saat dan proses peralihan harta waris

Di muka telah disinggung perihal pendapat Soepomo yang antara lain menyatakan, bahwa "proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta

keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai selagi orang tua masih hidup”.²⁹ Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, Soepomo mengambil contoh suatu keluarga di Jawa, keluarga mana terdiri dari anak laki-laki dan dua anak perempuan. Oleh karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja maka ayahnya memberikan sebidang sawah, pemberian mana dilakukan di hadapan kepala desa. Anak ke dua yang adalah anak perempuan, pada saat dinkahkan, diberi sebuah rumah. Menurut soepomo, maka pemberian tersebut bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan. Perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri.

Apabila pendapat Soepomo tersebut di atas dapat dijadikan suatu patokan yang sementara sifatnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saat terjadinya pengalihan harta waris terjadi, pada waktu harta tersebut diberikan kepada para ahli waris, yang mungkin terjadi pada saat pewaris masih hidup. Akan tetapi proses semacam itu, sangat cenderung terjadi pada masyarakat-masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual, dan frekwensinya kadang-kadang sering terjadi atau kadang-kadang juga jarang terjadi, oleh karena hal itu tergantung kepentingan masing-masing pihak. Di Bali, misalnya pemberian harta pada saat pewaris masih hidup, tidaklah dengan sendirinya merupakan pengalihan harta waris. Pemberian harta kepada ahli waris, semasa pewaris masih hidup, dapat berwujud, yakni pemberian lepas dari pewaris kepada ahli warisnya. Kecuali itu, maka pemberian

²⁹ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 231.

tersebut dapat berupa pemberian yang bersifat sementara, hanya untuk dinikmati hasilnya oleh ahli waris.

Pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat, maka beralihnya harta waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Proses macam itu juga mungkin terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kawarisan individual yang terbatas , seperti misalnya, di Bali.

Proses kewarisan semasa masih hidup atau pada saat meninggal dunia, berbeda dengan proses kewarisan secara hibah wasiat. Kadang-kadang seorang pewaris dihadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu (dapat juga dihadiahkan pada seseorang tertentu) di Jawa, misalnya, hibah wasiat yang demikian ini disebut *wekasan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di tempat-tempat lain disebut dengan istilah sendiri-sendiri. Warisan yang demikian ini merupakan peristiwa hukum yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal dunia.

Dilakukannya pewarisan secara hibah wasiat, pada dasarnya bertujuan:

- 1) Untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris.
- 2) Untuk mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang yang ditinggalkan, seperti barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak gadai, barang-barang yang disewa dan sebagainya. Kadang-kadang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis melalui

perantara seorang notaries (*testament*). Menurut Supomo, meskipun hibah wasiat itu berbentuk akte notaris, sah atau tidaknya isi hibah wasiat itu dikuasai oleh hukum adat. Misalnya, tidak akan sah suatu pemberian kepada seorang waris yang bukan teman sedesa.

b. Bagian dan Pembagian Harta Warisan

Pada masyarakat hukum adat bilateral atau parental (dan sebagian dari masyarakat hukum adat patrilineal), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Di Jawa, misalnya, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo bahwa “pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan”.³⁰ Tetapi di beberapa desa terutama di Jawa Tengah, anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan.

Demikian juga halnya dengan masyarakat di Sumatra Selatan. Disana telah terdapat kecenderungan agar harta warisan itu dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian yang tidak sama. Bagi masyarakat Rote di Nusa Tenggara Timur, yang pada dasarnya Patrilineal, anak laki-laki tertualah yang memperoleh bagian terbesar dari warisan. Hal ini didasarkan pada keadaan bahwa anak laki-laki tertua itu paling besar tanggung jawabnya terhadap keutuhan keluarganya, karena ia merupakan pengganti ayahnya. Anak laki-laki tertua itu memperoleh bagian sebesar

³⁰ *ibid.*, h. 140.

satu setengahnya dari bagian seluruhnya dari harta kekayaan, sedangkan saudara-saudara laki-lakinya yang lain hanya akan menerima satu bagian, kecuali anak laki-laki yang paling muda (terbungsu), akan memperoleh tambahan rumah ayah-ibunya. Untuk dapat lebih memahami uraian di atas, maka diberikan contoh sebagai berikut. Seorang pewaris mempunyai tanah pertanian yang menjadi harta warisan, misalnya seluas enam hektar, ahli warisnya berjumlah lima orang, maka anak laki-laki tertua akan memperoleh sebesar $1 \frac{1}{2} \times \frac{6}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{6}{5} = 1,8$ ha. Anak laki-laki lainnya akan memperoleh harta warisan sebesar 1,05 ha, ditambah dengan sebuah rumah.

Pada masyarakat Pulau Andora (di Nusa Tenggara Timur), anak perempuan adalah memperoleh warisan berupa perhiasan dan benda-benda lainnya, tetapi tanah dan kebun merupakan bagian dari anak laki-laki saja.

Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang kebetulan menganut sistem kewarisan mayorat (laki-laki maupun perempuan), harta warisan tidak dibagi-bagi. Sebabnya adalah, bahwa yang menjadi ahli waris adalah hanya anak tertua (laki-laki maupun perempuan). Demikian juga keadaannya pada masyarakat Hitu di Ambon (yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal), harta warisan tidak dibagi-bagi. Tetapi berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem patrilineal lainnya yang menganut sistem mayorat (laki-laki), misalnya di Lampung, pada masyarakat Hitu ini tidak ditentukan siapa yang menguasai harta warisan itu, oleh karena di sini ahli warisnya adalah keluarga dan family secara keseluruhan.

Pada masyarakat Tapanuli “batak”, oleh karena ahli warisnya adalah anak laki-laki (semua anak laki-laki), maka sudah tentu harta warisan itu dibagi-bagi

kepada ahli warisnya (kalau anak laki-laki itu lebih dari satu orang). Bagaimana komposisi pembagian warisan di sana, dapat diasumsikan harta itu akan dibagi secara merata pada tiap anak laki-laki. Demikian juga halnya pada masyarakat bali, yaitu harta itu akan dibagi kepada para ahli warisnya termasuk di dalamnya adalah anak angkat (laki-laki).

Hampir sama dengan masyarakat Hitu di Ambon, adalah masyarakat Minangkabau. Seperti telah diketahui masyarakat Minangkabau adalah masyarakat matrilineal, akan tetapi dalam hal waris disini tidak di adakan pembagian. Oleh karena yang menguasai warisan itu adalah anggota keluarga (anak-anak kandungnya) dan seluruh kerabat atau family yang diwakili oleh mamak kepala waris.

Dengan menelaah uraian di atas, maka disimpulkan bahwa pada masyarakat di Indonesia, terdapat harta warisan yang tidak dibagi-bagi kepada ahli warisnya tetapi juga terdapat ketentuan yang membagi-bagikan harta warisan itu kepada ahli warisnya. Namun demikian kesimpulan yang diberikan ini agak terlalu umum, oleh karena pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan yang individual, baik individual terbatas maupun tidak, masih terdapat harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya secara individual, dan masih terdapat harta warisan yang dikuasai secara bersama yang melambangkan kesatuan dari keluarga itu. Misalnya, di daerah Sulawesi Utara, khususnya pada Masyarakat Minahasa, Barang Kalakeran adalah juga milik family yang tidak dapat dibagi-bagikan, kecuali jikalau semua anggota yang berhak menghendaki serta menyetujui barang itu dibagi-bagi. Juga, terdapat misalnya, sebidang tanah yang selalu dipertahankan menjadi milik family,

yaitu yang disebut tanah wawakes un teranak. Tanah yang demikian ini mempunyai fungsi sebagai tanah pengikat yang riil terhadap tali kekeluargaan famili, jadi sebagai lambang persatuan dan kesatuan famili. Disamping itu tanah demikian ini lazimnya merupakan sebidang tanah yang telah berkurang artinya apabila akan dibagi-bagi merata diantara para ahli warisnya.³¹

Namun demikian, dalam memperoleh harta warisan adat, terdapat beberapa kasus dalam pembagian kewarisan adat, yaitu:

a. Pembagian waris menyamping

Pembagian waris menyamping apabila anak, ayah atau ibu, suami atau istri tidak ada, misalnya kerana pada waktu yang bersamaan orang-orang tersebut kecelakaan hingga meninggal dunia, maka hartanya dipisahkan. Harta asal kembali kepada kerabat asal. Kerabat asal dalam ikatan perkawinan yakni saudara suami atau istri. Kerabat suami atau istri memperoleh bagian sebesar harta gono-gini yang dimiliki oleh suami atau istri.

b. Penggantian waris

Dikenal dengan penggantian pembagian waris. Penggantian waris terjadi apabila ahli waris menggantikan orang tuanya yang meninggal. Misalnya, cucu-cucu menggantikan kedudukan seorang anak dari pewaris. Seandainya anak tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka warisan dari pewaris akan jatuh kepada

³¹ *ibid.*, h. 270-274

anaknya (cucu pewaris). Contoh lain misalnya keponakan menggantikan kedudukan saudara yang telah meninggal.

c. Pembagian waris untuk anak kecil

Ahli waris yang baru dilahirkan dan tidak lama kemudian ibunya menikah lagi, maka harta waris dari bapaknya dipegang oleh ibunya yang akan diberikan ketika anak tersebut telah dewasa. Namun seandainya sang ibu melakukan perbuatan tercela, seperti pemborosan, judi, maka sang anak dapat meminta warisan itu diserahkan padanya meski ia masih kecil. Hal ini dalam hukum adat diperbolehkan.

d. Tidak dibagikan

Dalam beberapa kasus hukum adat, bisa terjadi harta waris tidak dibagikan melainkan dibiarkan utuh. Selama tidak ada yang menggugat waris, maka harta tersebut tidak dibagikan.³²

³²Badriah Harun SH, *op. cit.*, h.12-13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kabupaten Jeneponto dimana lokasi tersebut merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya menjadi subjek dari diberlakukannya sistem kewarisan adat yang akan menjadi objek penelitian penulis, karena dari sebagian besar masyarakat kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan kewarisannya tidak menerapkan aturan yang berlaku dalam hukum Islam melainkan menggunakan sistem pembagian warisan secara adat.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari beberapa tokoh masyarakat di kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto.
2. Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literature baik dari perundang-undangan maupun buku-buku tentang aturan hukum Islam dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari tiga belas desa.

2. Sampel

Sampel dari penelitian yang dilakukan diambil dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan tersebut, sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam, namun dalam proses pembagian harta warisnya, masih berdasarkan atas ketentuan hukum kewarisan adat.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk melengkapi data primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara, yakni mengadakan tanya-jawab dengan para tokoh pemangku adat, para tokoh masyarakat dan para pihak yang bersangkutan menerapkan ketentuan hukum adat dalam sistem pembagian kewarisannya.
2. Dokumentasi, yakni penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan diterapkannya hukum adat di kabupaten Jeneponto.

E. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan oleh penulis telah rampung, baik data primer maupun data-data sekunder, data-data tersebut akan diolah dahulu dan kemudian dianalisis secara kualitatif, deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mengenal Wilayah Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto adalah salah-satu daerah yang ada di provinsi Sulawesi-Selatan, Kabupaten Jeneponto terdiri dari sepuluh kecamatan dari 84 (delapan puluh empat) Desa dan 28 (dua puluh delapan) Kelurahan. Topografi Kabupaten Jeneponto:

- a. Sebelah utara merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 500-1400 M di atas permukaan laut.
- b. Sebelah selatan meliputi dataran rendah dengan ketinggian 0-150 M di atas permukaan laut.
- c. Bagian tengah memiliki ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut.¹

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten yang masih mencerminkan kuatnya adat istiadat, hal ini dapat dilihat dari sistem pembagian warisannya hingga saat ini. meskipun di Kabupaten Jeneponto banyak organisasi Islam, namun dalam pelaksanaan kewarisannya tidak sepenuhnya menggunakan sistem kewarisan Islam dalam pembagiannya. Bahkan Kabupaten ini bisa dikatakan merupakan salah satu daerah yang tergolong tua dalam adat istiadatnya.

Masyarakat Jeneponto sebagian besarnya adalah berprofesi sebagai petani baik petani ladang maupun petani rumput laut, sedangkan sebagian kecil lainnya adalah wira usaha, Pegawai Negri Sipil, nelayan dan sebagainya.

¹ Raja Milo, *Merajut Jeneponto Dalam Bingkai Agama* (Jakarta, Yapensi, 2007), h.IV.

B. Sistem Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Dari hasil penelitian penulis mengenai sistem pewarisan secara adat di Kabupaten Jeneponto, penulis memperoleh hasil penelitian mengenai sistem kewarisan adat di Kabupaten Jeneponto yakni:

Dalam Hukum Waris Adat yang berlaku di Kabupaten Jeneponto harta warisan dikelola oleh anak tertua laki-laki, karena anak laki-laki tertua dianggap lebih mampu bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola harta tersebut.²

Harta warisan dalam sistem Hukum Adat yang diterapkan oleh sebagian masyarakat hukum adat kabupaten Jeneponto tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat terbagi menurut jenis kepentingan para ahli waris. Sebagai contoh, seorang anak laki-laki telah berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya apabila anak tersebut telah menikah. Hal ini dilakukan agar anak tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan dalam rumah tangganya.³

Dalam Hukum Waris Adat yang berlaku di Kabupaten Jeneponto tidak mengenal bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam. Dengan kata lain, pembagian warisan mengikut pada kehendak pewaris atau keputusan bersama mengenai berapa jumlah bagian warisan yang akan diterima oleh para ahli waris.⁴

² Mallappiang Pabeta, Tokoh Masyarakat, Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Wawancara oleh penulis di Bontoramba, 10 Oktober 2011.

³ Muh. Abbas Mile, Sekertaris Desa Lentu Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto. Wawancara penulis di Bontoramba, 13 oktober 2011.

⁴*Ibid.*

Hukum Waris Adat ini tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. Pembagian harta warisan sepenuhnya hak orang tua atau pemilik harta warisan. Dalam pembagiannya, para ahli waris dalam satu waktu tidak berhak meminta agar harta warisan segera dibagikan, karena hak untuk membagikan harta warisan dan kepada siapa harta tersebut dibagikan sepenuhnya adalah hak orang tua atau pemilik harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris adat di Kabupaten Jeneponto, ahli waris tidak selamanya memperoleh warisan hanya ketika si pewaris telah meninggal dunia tetapi ahli waris dapat memperoleh warisannya ketika si ahli waris telah membutuhkannya, sebagai contoh, orang yang telah menikah telah berhak menerima bagian warisannya agar si menerima warisan atau ahli waris dapat menggunakan harta tersebut untuk keperluannya. Contoh lain, anak yang akan menikah diberikan sebuah kebun yang akan digunakannya sebagai barang pemberian atau mahar kepada calon istrinya yang dalam bahasa Makassar dikenal dengan sebutan "*sunrang*". Jika demikian, ahli waris tersebut tidak berhak lagi meminta bagian warisan kepada orang tuanya karena bagian warisannya telah diambil lebih dahulu olehnya. Kecuali, anak tersebut adalah anak laki-laki tunggal atau sulung atau ahli waris lain telah mendapatkan bagian warisannya masing-masing namun masih ada harta warisan yang masih tersisa dan belum ada yang memiliki.

Jika dalam kasus pewaris meninggal dunia, dalam hukum Islam harta warisan tersebut baru boleh dibagikan setelah harta itu disisihkan segala yang menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan fardu kifayahnya),

hutang piutang dan sebagainya. Dalam hukum kewarisan Islam ikhwal seperti ini dikenal dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, namun hukum adat waris Jeneponto tidak seperti demikian, pengurusan mayat pewaris tidak ada kaitannya dengan harta warisan untuk digunakan sebagai biaya pengurusan mayat pewaris, karena biaya pengurusan mayit ditanggung bersama oleh para kerabat dekat.⁵

Jika dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak menerima harta warisan, berbeda dengan hukum kewarisan adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto, anak angkat justru berhak memperoleh harta warisan. Sebagai contoh, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan seorang anak angkat, jika anak angkat tersebut berasal dari keluarga dekat pewaris, maka harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris juga merupakan hak dari anak angkat tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus jika pewaris hanya meninggalkan seorang istri dan seorang anak angkat, harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya diberikan kepada istri dan anak tersebut tanpa ada ahli waris lain meskipun istri dari si pewaris mendapatkan bagian yang lebih.

Berbeda jika anak angkat tersebut adalah bukan berasal dari keluarga dekat atau dengan kata lain anak tersebut dipelihara dengan cuma-cuma, anak tersebut tidak berhak memperoleh warisan, namun anak tersebut dapat menggunakan harta tersebut dalam hal tertentu seperti menggunakannya untuk keperluan pendidikannya.

Dalam hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Jeneponto jika pewaris memiliki anak, maka harta warisan sepenuhnya adalah hak anak. Ada pun istri si

⁵ Mallappiang Pabeta. *Op cit.*

pewaris atau pun suami (jika si pewaris adalah wanita) tidak berhak memperoleh harta warisan dari pasangannya, pasangan dari pewaris hanya boleh memanfaatkan harta warisan tersebut tergantung pada kebutuhannya tanpa memiliki hak mutlak untuk menguasai harta tersebut kecuali atas persetujuan anak-anaknya. Artinya, harta warisan diprioritaskan untuk anak-anak si pewaris saja.⁶

Dalam sistem pewarisan adat Kabupaten Jeneponto, jika pewaris adalah orang yang memiliki dua istri atau lebih maka harta warisan yang diperoleh anak tergantung pada harta gono-gini yang diperoleh ibu dan ayahnya selama ibu kandungnya bersama dengan ayahnya. Sebagai penjelasan, anak hanya memperoleh harta warisan dari harta gono-gini antara ibu kandungnya sewaktu bersama dengan ayahnya.

Jika dalam sebuah kasus pewaris adalah orang tua baik istri atau suami yang meninggalkan anaknya sebagai ahli waris beserta pasangannya baik istri maupun suami yang ditinggalkan, jika istri atau suami si pewaris dianggap tidak cakap dalam mengelolah harta warisan atau menikah lagi, maka orang yang berhak mengelola harta warisan adalah anak tertua. Warisan tersebut baru akan dibagikan kepada ahli waris lain, jika ahli waris lain tersebut sudah dianggap mampu mengelola harta warisan tersebut dengan baik.

Dalam hukum Islam setiap anak kandung berhak mendapatkan harta warisan, sedangkan dalam hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto seorang anak yang melakukan perbuatan *assilariang* atau kawin lari, maka anak tersebut tidak

⁶ Sirajuddin Tola, Imam Lurahan Kel. Bontoramba. Wawancara oleh Penulis, 14 Oktober 2011.

berhak lagi memperoleh bagian dari harta warisan orang tuanya karna dianggap telah melanggar hukum adat.⁷

Seorang anak yang melakukan perbuatan *assilariang* atau *annyala* tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan tidak pula memperoleh hak perwalian dari orang tuanya.

Dalam sistem pembagian waris secara adat di Kabupaten Jeneponto ahli waris dapat digantikan oleh orang lain apabila ahli waris tersebut melakukan pelanggaran adat. Ahli waris yang melakukan pelanggaran adat seperti *assilariang* bukan hanya tidak berhak mendapatkan warisan tetapi juga tidak berhak memiliki perwalian dari orang tuanya, sanksi yang lebih keras bagi pelaku pelanggaran adat yang masyarakat Jeneponto kenal dengan istilah *tau annyala* atau *tau ni passala* adalah, orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut tidak boleh memperlihatkan dirinya kepada para keluarganya, dengan kata lain orang tersebut telah diasingkan dalam jangka waktu tertentu atau bahkan selamanya.⁸

Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan *Annyala* atau *ni Passala* penyebabnya antara lain adalah seseorang melakukan perbuatan tidak terpuji dan dipandang melanggar aturan adat, sebagai contoh, melakukan hal-hal seperti berzina, kawin lari atau diketahui memiliki hubungan silaturrahi dengan orang-orang yang diasingkan seperti orang yang melakukan perbuatan kawin lari.

⁷ Mallappiang Pabeta. *Op cit.*

⁸ *Ibid.*

Pelaksanaan kewarisan menurut hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto, tentunya memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya, Dalam hal ini penulis akan memaparkan permasalahan-permasalahan yang sering timbul akibat sistem kawarisan adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto, antara lain:

1. Karena kebanyakan harta warisan diserahkan kepada para ahli waris sebelum si pewaris meninggal dunia, sehingga banyak kejadian si ahli waris mengabaikan kebutuhan si pewaris setelah para ahli waris telah menerima bagian warisannya masing-masing.⁹
2. Karena pembagian harta warisan kebanyakan tergantung pada kehendak pewaris dan tidak ada aturan tetap mengenai pembagian harta warisan sehingga mengakibatkan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya berbeda-beda sistem pembagian warisannya. Akibat yang juga ditimbulkan apabila harta warisan dibagikan bergantung pada pewaris, dalam pembagian harta warisan tersebut sangat sulit seorang pewaris akan berlaku adil. Banyak kasus yang terjadi si pewaris memberikan bagian yang lebih banyak kepada para ahli waris yang dianggap lebih dekat dengan ahli waris.¹⁰
3. Dalam pembagian harta warisan yang diberlakukan oleh masyarakat Jeneponto sering terjadi tidakan diskriminasi yang penyebabnya antara lain:
 - a. Karena pemberlakuan hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto tidak berlaku asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sehingga sering

⁹ Muh. Abbas Mile. *Op cit.*

¹⁰ *Ibid*

terjadi ada ahli waris yang merasa didiskriminasi sehingga akhirnya muncul perselisihan yang mengakibatkan pertikaian yang bahkan mengakibatkan para ahli waris saling membunuh hanya karena masalah pembagian harta warisan tersebut. Kebanyakan kasus yang terjadi, para ahli waris saling membunuh hanya karena mempertahankan adat *Siri'*, yakni jika mereka merasa berhak untuk memiliki sebuah harta warisan namun digantikan oleh ahli waris lain.¹¹

- b. Kebanyakan pewaris memberikan bagian lebih kepada anak tunggal baik itu anak perempuan tunggal maupun anak laki-laki tunggal.¹²
- c. Jika harta warisan dikelola oleh anak tertua, meskipun ada hasil yang diberikan kepada ahli waris lain, kebanyakan ahli waris yang lain merasa iri karena menganggap anak tertua belum tentu bisa berlaku adil dalam membagi hasil dari harta warisan yang dikelolanya.¹³
- d. Karena anak angkat juga berhak atas harta si pewaris, hal ini sering menimbulkan masalah karena anak kandung atau pun kerabat si pewaris merasa tidak adil dengan bagian warisan yang diperoleh anak angkat.¹⁴
- e. Kebanyakan harta warisan diserahkan kepada anak ketika anak tersebut telah menikah. Pada kenyataannya hal tersebut tentunya lebih menguntungkan ahli waris yang menikah lebih dahulu dari ahli waris lainnya, sedangkan anak

¹¹ *Ibid.*

¹² Sirajuddin Tola. *Op cit.*

¹³ Mallappiang Pabeta. *Op cit.*

¹⁴ *ibid*

yang belum menikah, boleh saja saat dia menikah nanti hanya memperoleh warisan dengan jumlah yang lebih sedikit sehingga akan menimbulkan perasaan tidak adil di antara para ahli waris.¹⁵

- f. Karena pembagian harta warisan kebanyakan hanya tergantung pada kebutuhan para ahli waris, tidak tertutup kemungkinan ada ahli waris yang merasa tidak adil dengan pembagian warisan yang di perolehnya.¹⁶
- g. Jika dalam kasus seorang pewaris memiliki istri lebih dari satu orang, harta yang diperoleh anak tergantung pada harta gono-gini ibu kandungnya saat bersama dengan ayahnya, hal ini sangat jelas terlihat membedakan antara sesama anak se-ayah meskipun mereka berbeda ibu.¹⁷

C. Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan. Oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Adapun hukum Islam hanya mengenal satu sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, hukum Islam pun hanya mengenal satu macam sistem kewarisan yaitu individual.

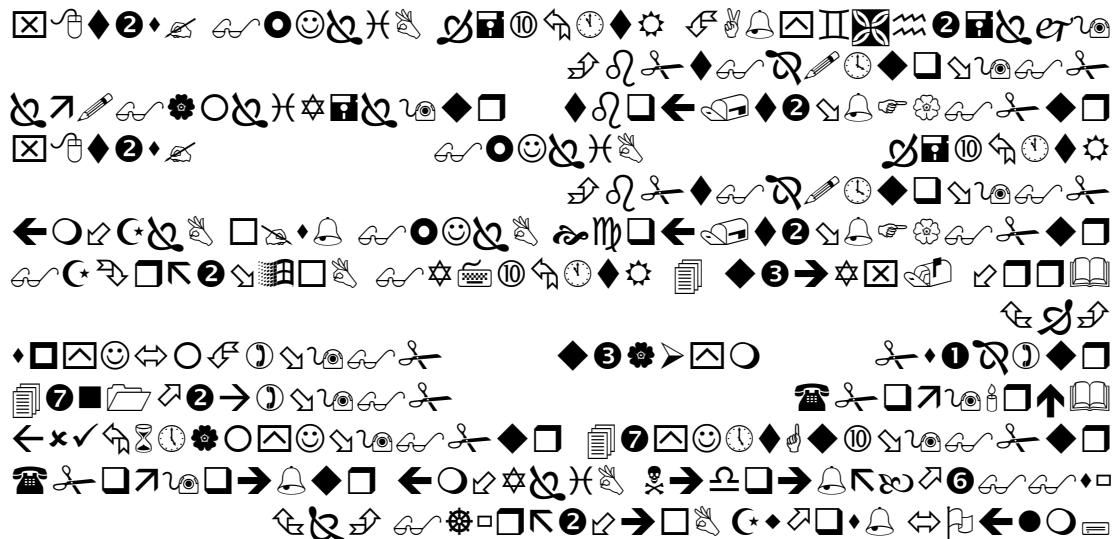
Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan

¹⁵ Sirajuddin Tola. *Op cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mallappiang Pabeta. *Op cit.*

maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris pria atau wanita yang masih hidup. Q. S. An-Nisa/4 :7-8.



Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁸

Sistem kewarisan mayorat yang ada dalam masyarakat adat Jeneponto, pada dasarnya sama dengan sistem kewarisan kolektif di mana setiap anggota ahli waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Semarang: Asy-Syifa, 1997), h. 79.

anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

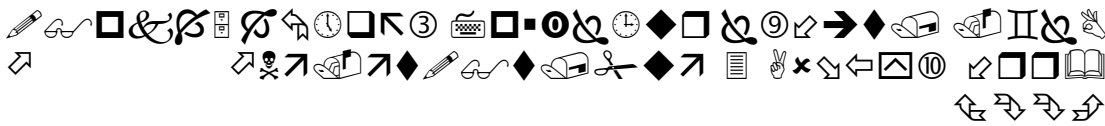
Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan di antara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang disampaikannya dengan terang kepada isteri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat adat Jenepono harta warisan dibagi-bagi kepada ahli waris meskipun pewaris masih hidup, sedangkan dalam hukum Islam, sebelum harta warisan dibagikan haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit, berupa hak dan

kewajibannya dari harta peninggalan itu dalam artian warisan baru dibagikan jika pewaris telah meninggal dunia.

Firman Allah Q.S. ¹ An-Nisa/4: 11:



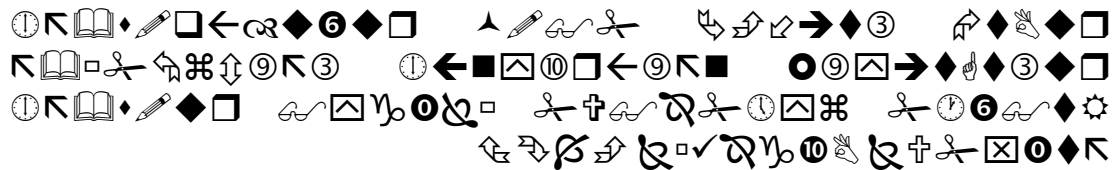
Terjemahnya:

”Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”¹⁹

Sedangkan sistem kewarisan yang dikenal dalam hukum Islam sejalan benar dengan pembawaan fitrah manusia, sistem ini mengambil pendirian bahwa dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-hartanya itu berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya, setelah berlalu beberapa waktu ahli waris itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk dijadikan milik bersama semenjak matinya si pewaris menjadi milik perseorangan dengan jalan berbagi. Sistem ini menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu telah dapat diketahui dengan pasti siapa ahli waris-ahli waris itu, setidak-tidaknya telah wajib diketahui pada saat berbagi itu.

¹⁹ *Ibid.*,

Namun demikian betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian harta warisan yang harus ditaati oleh ummat Islam dengan disertai ancaman hukuman sebagaimana firman Allah Q. S. An-Nisa/4: 14.



Terjemahnya:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”²⁰

Namun dalam pelaksanaannya terutama pada masyarakat Jeneponto sebagian besarnya tidak menggunakan tata cara pewarisan sesuai dengan hukum islam.

Di dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris:

1. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut al-Qur'an dan sunah Rasul, disebut ahli waris *zawî al-furûd*.
2. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun sunah Rasul, disebut ahli waris '*ashabah*.
3. Ahli waris yang tidak mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan waris *zawî al-furûd* dan '*ashabah*, disebut ahli waris *zawî al-arhâm*.

²⁰ *Ibid.*, h. 80.

Menurut hukum kewarisan adat Jeneponto bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum adat untuk mewarisi. Para ahli waris tersebut adalah :

Anak kandung, yang dimaksud yaitu semua anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya dalam perkawinan yang sah, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dalam kewarisan adat Jeneponto pihak perempuan sudah termasuk ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Dalam hal pembagian warisan dari harta peninggalan anak tertualah yang berhak menerimanya, hanya saja kedudukan anak tertua bukanlah mutlak tak terbatas, tetapi ia mempunyai kewajiban untuk dapat membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli waris lain (adik-adiknya).

Biasanya pembagian dilakukan dalam sebuah musyawarah keluarga dipimpin oleh anak tertua sebagai pengganti orang tuanya jika orang tua tersebut sudah tidak ada, jika masih ada maka tetap dipimpin oleh orang tua sebagai pewaris. Dalam musyawarah Bagian masing-masing ditentukan sesuai dengan kehendak pewaris, Di sini dapat terlihat bahwa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar karena tanggung jawab yang dipikulnyapun sulit.

Namun tidak selalu benar bahwa anak yang tertua mendapat porsi yang lebih besar karena bisa saja mendapatkan harta yang lebih sedikit dengan melihat keadaan harta peninggalan dan keadaan pewaris.

Anak tertua laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian harta warisan karena beberapa sebab:

Pertama, ia bertanggung jawab atas pengurusan kedua orang tuanya sampai mereka meninggal nantinya.

Kedua, ia bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Apabila dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali melainkan perempuan semua, maka anak perempuan yang paling tua diumpamakan sebagai anak laki-laki, sedangkan apabila anak laki-lakinya masih kecil maka tetap orang tua yang mengatur kecuali jika orang tuanya sudah meninggal sedangkan ahli waris masih kecil maka keluarga terdekat yang mengambil alih. Anak tertua tidak dapat semena-mena terhadap ahli waris lain karena ada di bawah pengawasan para keluarga terdekatnya.

Anak Angkat, Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak keluarga orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ia bukan anak pribadi menurut syari'at dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syari'at yang membenarkan arti yang demikian ini. pengambilan anak angkat seperti ini merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka me-materi-kannya di dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidak mampuan orang tuanya. Tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang amat disukai, dipuji dan dipahalai oleh syara'.

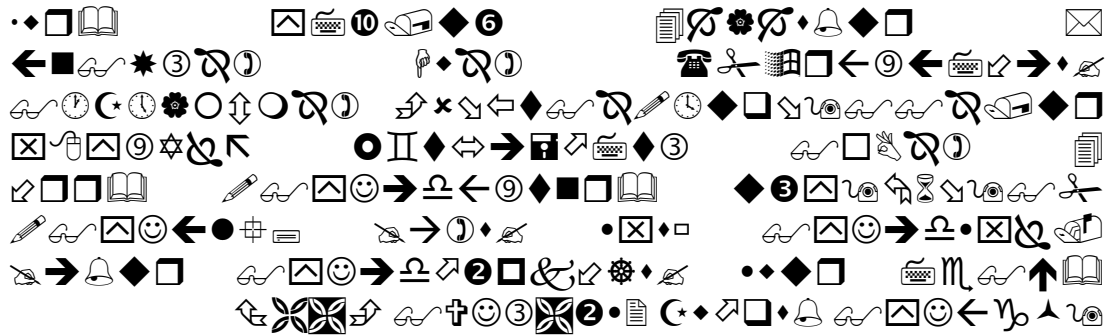
Istri atau Suami, jika pewaris tidak memiliki anak kandung maka harta warisan menjadi hak pasangannya baik ia istri ataupun suami yang ditinggalkan. Terkecuali jika keluarga dekat pewaris juga menuntut harta warisan. Namun jika tidak, harta warisan sepenuhnya dikuasai oleh pasangan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik ia istri maupun suami.

Keluarga terdekat, Keluarga terdekat memiliki hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris apabila anak kandung, anak angkat, istri atau suami, ayah, ibu tidak ada.

Dari pengamatan di lapangan, penyusun mencoba merumuskan dua hal yang bisa untuk dijadikan gambaran dalam memandang segi positif terhadap sistem kewarisan adat Jeneponto. Dua hal tersebut adalah :

1. Anak tertua laki-laki dijadikan pewaris utama dalam keluarga bukanlah semata-mata karena ia anak tertua yang harus selalu dihormati, dan didahulukan segala macam kebutuhannya. Sebenarnya ada beban berat yang harus dipikul di pundaknya. Sebagaimana penyusun kemukakan sebelumnya anak tertua mempunyai hak mutlak yang terbatas. Terbatas oleh musyawarah keluarga, terbatas kewajiban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak semata-mata berdasarkan harta warisan, tetapi juga berdasarkan asas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama. Dan yang terpenting dari semua itu adalah kewajiban mengurus orang tuanya apabila orang tuanya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk mengurus anak-anak yang

lain, bahkan kewajiban mengurus orang tua bukan saja ketika mereka masih hidup melainkan sampai mereka meninggal. Q.S.Al-Isra'/17: 23.



Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”²⁴

Ayat di atas menggambarkan bagaimana seharusnya kita mengurus orang tua saat mereka berusia lanjut. Ironis memang apabila kita melihat di beberapa daerah banyak orang tua yang terlunta-lunta dimasa tuanya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto dalam sistem pewarisannya, harta dibagikan kepada para ahli waris meskipun pewaris masih hidup. Sehingga banyak kejadian ahli waris setelah memperoleh harta warisan mereka melalaikan kewajibannya terhadap orang tuanya.

2. Kedudukan perempuan sudah mendapat tempat sebagaimana mestinya, dimana hal ini dapat kita lihat apabila dalam sebuah keluarga anak

²⁴ *Ibid.*, h. 285.

kandungnya perempuan semua tidak langsung mengangkat anak angkat sebagai pengganti laki-laki tetapi cukup mendudukkan anak perempuan tertua menggantikan anak laki-laki yang tidak ada tersebut, dan juga apabila di antara anak kandung terdapat perempuan maka ia tetap sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagian juga.

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai para ahli waris serta bagiannya yang terdapat dalam sistem kewarisan adat Jeneponto, tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Meskipun di Kabupaten Jeneponto Masyarakatnya dikenal sebagian besar adalah masyarakat yang religius, masyarakat di sini lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan muamalat kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang terpenting bagi masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan damai tanpa konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan rasa saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.

Sepintas kita dapat melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat adat Jeneponto dalam hal pembagian harta warisan yang tidak menggunakan hukum kewarisan Islam terkesan mendua. Disatu sisi merupakan muslim taat beragama tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peran tokoh agama dalam mensosialisasikan hukum *farâ'id* sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging.

Walaupun demikian, kita tidak bisa memponis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Jeneponto adalah haram, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Jeneponto dengan cara musyawarah atau perdamaian tidaklah merugikan pihak lain. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama dan di dalam pembagiannya yaitu tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar persetujuan bersama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kecuali jika ada ahli waris yang mempermasalahkan bagian warisannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan : “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.²⁵ Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *fara'id* hal ini disebut dengan *tashaluh*. *Tashâluh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tashâluh* seperti ini diperbolehkan, selama *tashâluh* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam al-Qur'an maupun hadis.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat Jeneponto yaitu dengan cara musyawarah dan merelakan bagian yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kaedah fikih disebutkan :

الرضاء سيد الاحكام

Terjemahnya:

“Kerelaan adalah penghulu (puncak) hukum.”²⁶

Kaedah tersebut sesuai dengan prinsip *tashâluh* yaitu kerelaan dalam menerima bagian harta warisan. Praktek tasaluh dalam pembagian harta warisan, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan *nas*. Namun demikian hal tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka tujuan pembentukan hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Darokah bahwa ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah *nash* tidak terpenuhi. Sebab dalam memakai ketentuan nas dalam al-Qur'an maupun *hadis* untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan-ungkapan lafaz *nash* kadang dapat mengandung pengertian yang berbeda-beda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari nas tersebut salah satunya adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan ketentuan hukum syara'.²⁷

²⁶ Al-Iman Jalaluddin As-Suyuti *Al-Asyibah wa An-Nazair*, h. 74. “kaidah ini tida berlaku pada perbuatan yang mendatangkan mufsadat.”

²⁷ *Ibid.*, h. 97-98.

Di dalam mereka bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak hak. Terkecuali jika ada salah satu ahli waris yang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Memakan harta bathil itu dapat kita pahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya. Dengan begitu, batas antara memakan harta orang lain secara hak dan memakan harta orang secara bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil sebagaimana yang dilarang dalam Q. S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendapatkan harta dengan cara yang batil diantara kalian.”²⁸

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan di Jeneponto mengutamakan rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, juga bergantung pada kehendak pewaris, dan ini terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an.

²⁸ Departemen Agama, *op, cit.*, h. 84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat adat Jeneponto adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-laki. Ia berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Ada beberapa alasan mengapa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar. *Pertama*, anak tertua bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. *Kedua*, anak tertua bertanggung jawab atas kedua orang tuanya sampai mereka meninggal nantiya.
2. Sistem dan Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Jeneponto tidak sesuai dengan *farâ'id*. Banyak perbedaan antara sistem pembagian kewarisan secara adat di Kabupaten Jeneponto dengan sistem kewarisan islam, jika dalam Islam permasalahan warisan muncul saat si pewaris telah meninggal dunia sedangkan dalam sistem kewarisan adat kabupaten Jeneponto, harta waris justru dibagikan ketika si pewaris masih hidup.

3. Dampak yang sering timbul dari system kewarisan adat yang diberlakukan oleh sebagian besar masyarakat Jeneponto adalah sering terjadi pertikaian yang penyebabnya antara lain, karena pemberlakuan hukum adat yang berlaku di kabupaten Jeneponto tidak berlaku asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sehingga sering terjadi ada ahli waris yang merasa didiskriminasi sehingga akhirnya muncul perselisihan yang mengakibatkan pertikaian yang bahkan mengakibatkan para ahli waris saling membunuh hanya karena masalah pembagian harta warisan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah penyusun untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sistem dan praktek pembagian harta warisan yang berlaku di Jeneponto kurang mencerminkan rasa keadilan, oleh sebab itu hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorang ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
3. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, M. Asyarbani, *Maknul Mukhtaj*, Kairo: Mstafa Al-Babi Al-Halab, 1958.
- Ayu, Riana Kesuma, *Sistem Hukum Waris Adat*. <http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat-36k>. (2 Mei 2011).
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Semarang: CV Asy-Syifa'. 1998.
- Harun, Badriah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Haar, B. Teer, *Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung : Pradnya Paramita, 1989.
- Hidayat, Dani, *Bulughul Maram versi 2.0.2008*, <http://hadithalislam.com/bayan/tree.asp?lang=ind>. Akses tanggal 2 November 2011
-, *Kitab Faraid Sahih Muslim Nonor 3027*, <http://hadithalislam.com/bayan/tree.asp?lang=ind>. Akses tanggal 2 November 2011.
-, *Ringkasan Syarah Arbain An-Nawawi, Bab Faraid Nomor 3036* <http://hadithalislam.com/bayan/tree.asp?lang=ind>. (Akses tanggal 2 November 2011).
- Jalaluddin As-Suyuti, Al-Iman, *Al-Asyibah wa An-Nazair*.
- Milo, Raja. *Erajut Jeneponto dalam Bingkai Agama*. Jakarta; Yapensi, 2007.
- Sakban, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan adat*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja wali Pers, 2007.
- Sofyan Evendi, *Hadis Web Kumpulan dan Referensi Belajar hadis*, <http://opi.110mb.com/>. (27 Maret 2006)
- Sulaiman Ibnu Al-Asy'as, Abu Daud, *Kitab Al faraid, Bab Fi Al-Jaddati, No. 1458*, Beirut: Dar. Al-Fikr, 1993.

UIN Alauddin Makassar, *PEDOMAN KARYA TULIS ILMIAH Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* .Makassar: Alauddin Pers,2009.

Yunus, Asaad, *Pokok-pokok kewarisan islam*, Jakarta: Al-Qushwa. 2009.

As-Sidiq, Hasbi, *Fiqh Mawaris hukum Waris Dalam Syariah Islam*, Jakarta: Bulan Buntang, 1979.